KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 401 /KIP/XI/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Jakarta, 3 November 2026

Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Badan Publik c.q Atasan PPID
di
Tempat.

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mempertimbangakan Surat Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 283/KIP/VIII/2026 perihal Tahapan & Penyampaian SAQ Monev KIP Tahun 2026, berikut disampaikan hasil akhir verifikasi SAQ 2026 dan dinyatakan **LOLOS** untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu **Uji Publik**. Hasil verifikasi akhir dapat dilihat melalui *https://e-monev.komisiinformasi.go.id/* pada menu **Kuesioner, Hasil Kuesioner, Nilai Kuesioner** dan bersifat final.

Tahapan Uji Publik akan menentukan kualifikasi keterbukaan informasi dan peringkat secara nasional. Untuk kepentingan tersebut, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengundang **Pimpinan Badan Publik** yang telah dinyatakan **LOLOS** untuk menghadiri kegiatan sebagai berikut :

Pembukaan dan *Technical Meeting*
Hari/tanggal : Senin, 09 November 2026
Jadwal : 13.00 WIB
Pelaksanaan : Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89969400486?pwd=K7Wf7QGv5JYhlyJZXGXsVCuig2bsQq.1
Meeting ID: 899 6940 0486
Passcode: 891535

Uji Publik
Hari/tanggal : Selasa, Rabu, Kamis / 10, 11 dan 12 November 2026
Jadwal : *Terlampir*
Tempat : Grand Mercure Kemayoran
Jl H, Superblok Mega Kemayoran, Jl. Benyamin Sueb Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.Kav B6, Jakarta

Terhadap Badan Publik yang dinyatakan lolos tahap uji publik agar membuat bahan sosialisasi yang menarasikan kesiapan mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi, dan selanjutnya diposting pada media komunikasi yang dimiliki (layar billboard, media sosial dan lain sebagainya) terhitung mulai tanggal 6 November 2026.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Sdri. Aditya Nuriya S. (0813-9453-1389) atau Sdr. Reno (0857-7402-5929).

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



HANDOKO AGUNG SAPUTRO

Narahubung Badan Publik

1.	Kementerian	: Binarlyn Indri Rahayu	(0857-4731-0654)
2.	LN & LPNK	: Istiningsih	(0812-9864-7306)
3.	LNS	: Reno Bima Yudha	(0857-7402-5929)
4.	Pemprov	: Istiningsih	(0812-9864-7306)
5.	BUMN	: Leni Sulistiani	(0857-7008-8088)
6.	PTN	: Siti Ajijah	(0819-0242-1569)
7.	Parpol	: Siti Ajijah	(0819-0242-1569)
8.	Protokoler	: Amay	(0858-8094-5327)
		Rano	(0857-7870-0896)

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran Surat I
Nomor : 401 /KIP/XI/2026
Tanggal : 3 November 2026

I. KEMENTERIAN

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Hak Asasi Manusia
8. Kementerian Hukum
9. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
11. Kementerian Kebudayaan
12. Kementerian Kehutanan
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
15. Kementerian Kesehatan
16. Kementerian Ketenagakerjaan
17. Kementerian Keuangan
18. Kementerian Komunikasi dan Digital
19. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
20. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
21. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
22. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
23. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
24. Kementerian Koperasi
25. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
26. Kementerian Luar Negeri
27. Kementerian Pariwisata
28. Kementerian Pekerjaan Umum
29. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Kementerian Pemuda dan Olahraga
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
33. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
34. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
35. Kementerian Perdagangan
36. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
37. Kementerian Perhubungan
38. Kementerian Perindustrian
39. Kementerian Pertahanan
40. Kementerian Pertanian
41. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
42. Kementerian Sekretariat Negara
43. Kementerian Sosial
44. Kementerian Transmigrasi
45. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

II. LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Gizi Nasional
3. Badan Informasi Geospasial
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Kepegawaian Negara
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
7. Badan Narkotika Nasional
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
10. Badan Pangan Nasional
11. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
12. Badan Pemeriksa Keuangan
13. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
19. Badan Pusat Statistik
20. Badan Riset dan Inovasi Nasional
21. Badan Siber dan Sandi Negara
22. Badan Standardisasi Nasional
23. Bank Indonesia
24. Dewan Perwakilan Daerah
25. Dewan Perwakilan Rakyat
26. Kejaksaan Agung RI
27. Kepolisian Negara Republik Indonesia
28. Komisi Yudisial
29. Lembaga Administrasi Negara
30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
31. Lembaga Ketahanan Nasional
32. Lembaga Penjamin Simpanan
33. Mahkamah Agung
34. Mahkamah Konstitusi
35. Majelis Permusyawaratan Rakyat
36. Otoritas Jasa Keuangan
37. Perpustakaan Nasional
38. Radio Republik Indonesia
39. Televisi Republik Indonesia

III. LEMBAGA NON STRUKTURAL

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum
5. Badan Pengelola Keuangan Haji
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
7. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
8. Komisi Kejaksaan RI
9. Komisi Kepolisian Nasional
10. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
12. Komisi Pemberantasan Korupsi
13. Komisi Pemilihan Umum

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

14. Komisi Penyiaran Indonesia
15. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
16. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban
17. Lembaga Sensor Film
18. Ombudsman Republik Indonesia
19. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

IV. PEMERINTAH PROVINSI

1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemerintah Provinsi Bali
4. Pemerintah Provinsi Banten
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Pemerintah Provinsi Gorontalo
7. Pemerintah Provinsi Jambi
8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
10. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
13. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
15. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
17. Pemerintah Provinsi Lampung
18. Pemerintah Provinsi Maluku
19. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
20. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. Pemerintah Provinsi Papua
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
26. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
27. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
28. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

V. BADAN USAHA MILIK NEGARA

1. Perum BULOG
2. Perum Damri
3. Perum Jasa Tirta I
4. Perum Jasa Tirta II
5. Perum LPPNPI
6. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
7. Perum Perhutani
8. Perum Perumnas
9. PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero)
10. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
11. PT ASABRI (Persero)
12. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
13. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
14. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
15. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
17. PT Bio Farma (Persero)

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

18. PT Brantas Abipraya (Persero)
19. PT Danareksa (Persero)
20. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
21. PT Hutama Karya (Persero)
22. PT Industri Kereta Api (Persero)
23. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
24. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
26. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
27. PT Len Industri (Persero)
28. PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
29. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
30. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
31. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
32. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
33. PT Pertamina (Persero)
34. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
35. PT Pos Indonesia (Persero)
36. PT Pupuk Indonesia (Persero)
37. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
38. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
39. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
40. PT Taspen (Persero)
41. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
42. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
43. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

VI. PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis
2. Institut Agama Islam Negeri Manado
3. Institut Agama Islam Negeri Parepare
4. Institut Agama Islam Negeri Pontianak
5. Institut Agama Islam Negeri Sorong
6. Institut Agama Kristen Negeri Ambon
7. Institut Agama Kristen Negeri Kupang
8. Institut Agama Kristen Negeri Manado
9. Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
10. Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
11. Institut Pertanian Bogor
12. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
13. Institut Seni Indonesia Denpasar
14. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
15. Institut Teknologi Bandung
16. Institut Teknologi Kalimantan
17. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
18. Institut Teknologi Sumatera
19. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya
20. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
21. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
22. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
23. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng
24. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
25. Universitas Airlangga
26. Universitas Andalas
27. Universitas Bangka Belitung
28. Universitas Bengkulu

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

29. Universitas Brawijaya
30. Universitas Diponegoro
31. Universitas Gadjah Mada
32. Universitas Hasanuddin
33. Universitas Indonesia
34. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
35. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
36. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
37. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
38. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
39. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
40. Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
41. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
42. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
43. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
44. Universitas Islam Negeri Mataram
45. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
46. Universitas Islam Negeri Palopo
47. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
48. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
49. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
50. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
51. Universitas Islam Negeri Salatiga
52. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
53. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
54. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
55. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
56. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
57. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
58. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
59. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
60. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
61. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus
62. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
63. Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi
64. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
65. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
66. Universitas Jambi
67. Universitas Jember
68. Universitas Jenderal Soedirman
69. Universitas Lampung
70. Universitas Mataram
71. Universitas Mulawarman
72. Universitas Negeri Gorontalo
73. Universitas Negeri Jakarta
74. Universitas Negeri Malang
75. Universitas Negeri Medan
76. Universitas Negeri Padang
77. Universitas Negeri Semarang
78. Universitas Negeri Surabaya
79. Universitas Negeri Yogyakarta
80. Universitas Nusa Cendana
81. Universitas Padjadjaran
82. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
83. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
84. Universitas Pendidikan Ganesha
85. Universitas Pendidikan Indonesia

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

86. Universitas Riau
87. Universitas Sebelas Maret
88. Universitas Siliwangi
89. Universitas Singaperbangsa Karawang
90. Universitas Sriwijaya
91. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
92. Universitas Sumatera Utara
93. Universitas Syiah Kuala
94. Universitas Tadulako
95. Universitas Tanjungpura
96. Universitas Terbuka
97. Universitas Tidar
98. Universitas Trunojoyo Madura
99. Universitas Udayana

VII. PARTAI POLITIK

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8. Partai NasDem

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**